

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA TANJUNG BALAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

FEBRI PRADANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin di desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang diantaranya 3 aparat desa dan 10 informan penerima beras miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin di desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara umum belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan 6T, karena keenam indikator belum sepenuhnya tepat, dimulai dengan ketepatan sasaran yang masih kurang tepat karena pemerataan, ketepatan jumlah karena dilakukan pemerataan maka mengurangi jumlah, ketepatan harga tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, ketepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan pendistribusian dalam setiap bulannya, ketepatan kualitas masih banyak mutu beras yang berbau, pecah-pecah dan berwarna, ketepatan administrasi belum terpenuhinya semua prosedur administrasi. Kemudian faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin di desa Tanjung Balam adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Faktor eksternal yaitu faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, tidak adanya pendataan ulang setiap tahun oleh pemerintah, dan faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Untuk itu dapat disarankan bahwa: pertama ketepatan sasaran, rumah tangga sasaran penerima beras miskin harus sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, kemudian yang kedua ketepatan jumlah, jumlah yang harus diberikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/Bulan. Ketiga ketepatan harga, harga tebus beras miskin (HTR) yang diberikan kepada RTS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 1.600/Kg TD. Keempat ketepatan waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kelima ketepatan kualitas, kualitas beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang keenam ketepatan administrasi, administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat pada waktunya.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Penyaluran

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF POOR RICE POVERTY (RASKIN) IN TANJUNG BALAM VILLAGES OF SUBSCRIBES OF SIAK HULU KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

FEBRI PRADANA

The purpose of this research is to know and explain the implementation of poor rice distribution policy as well as the obstacle factor in the implementation of poor rice distribution policy in Tanjung Balam Village, Siak Hulu District, Kampar District. This research uses qualitative method with phenomenology research type. The technique of determining informant in this research is purposive technique so informant in this research amounted to 13 people including 3 village officer and 10 informant recipients of poor rice. Based on the research, it is found that the implementation of the poor rice distribution policy in Tanjung Balam Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar regency in general has not fully refer to the 6T provision because the six indicators are not yet fully accurate, starting with the accuracy of the target which is still inappropriate because equity, because it is done equity then reduces the amount, the accuracy of the price is not in accordance with the predetermined government, the timeliness is still frequent delays in every month distributions, quality accuracy is still a lot of quality of rice that smells, chapped and colored, the accuracy of administration has not fulfilled all administrative procedures . Then the factors that hampered the implementation of the poor rice distribution policy at Tanjung Balam Village were internal and external factors. Internal factors are low knowledge of society, low public complaints and high social jealousy factor. External factors include the lack of government oversight to control the implementation of raskin, lack of socialization about raskin, the absence of annual re-registration by the government, and factors beyond the limits of village officials. Therefore, it may be suggested that: first the target accuracy, the target household receiving poor rice must be in accordance with the data published from the integrated data base managed by TNP2K, then the second the exactness of the amount, the amount to be given to the RTS-PM of 15Kg / RTS / Month. Third price accuracy, the price of poor rice (HTR) given to RTS in accordance with the price set by the central government of Rp. 1.600 / Kg TD. Fourth timeliness, timing of distribution of rice to target beneficiary families in accordance with the Raskin distribution plan established by the central government. Fifth quality, quality raskin quality given to poor families of good quality so that it can fulfill calorie and energy for poor family in carrying out its activity. And the sixth of administrative accuracy, administrative fulfillment of administrative requirements required for the completion of subsidies and payment of rice prices correctly and in a timely manner.

Keywords: Evaluation, Policy, Distribution